Model Penanganan Pasca Bencana yang Berlandaskan Pendekatan Budaya Setempat (Kearifan Lokal) Melalui Peningkatan Kesiapan Menghadapi Perubahan Dan Motivasi Berprestasi Pada Para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Wilayah Sumatera Utara

PMKI (Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia)

[1]Dr. Dana Waskita, M. AppLing., [2]Prof. Zahrotur Rusyda Hinduan, [1]RR. Sri Wachyuni, M.Psi., [1]Dr. Tri Sulistyaningtyas, M. Hum., [1]Harifa Ali Albar Siregar, Ph.D.

[1]Fakultas Seni Rupa dan Desain, ITB; [2]Fakultas Psikologi, Unpad

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai upaya penguatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Penanganan pascabencana berfokus pada kapasitas manusia, kondisi psikologis, pelayanan publik, serta nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode partisipatoris dengan melibatkan 20 peserta yang berasal dari OPD. Hasil kegiatan menegaskan pentingnya iintegrasi psikologi, budaya, bahasa, kelembagaan, dan teknologi dalam penanganan pascabencana. Kearifan lokal diposisikan sebagai bagian dari identitas dan sumber pengetahuan masyarakat yang dapat memperkuat ikatan sosial, solidaritas, dan kemampuan masyarakat untuk bangkit bersama. Kegiatan ini menghasilkan dasar bagi pegembangan model penanganan pascabencana berlandaskan nilai budaya yang lebih manusiawi, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: OPD, Pemulihan Pascabencana, Kesiapsiagaan, Budaya, Bahasa, *Psychological First Aid*

Introduction

Pada November 2025, bencana alam berskala besar melanda wilayah di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sehingga membutuhkan penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pada program ini, kegiatan dilakukan di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Penanganan pascabencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Kompleksitas persoalan pascabencana membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai lembaga pelayanan masyarakat. OPD memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai tahapan pengelola bencana. Dalam situasi pascabencana yang ditandai oleh perubahan sosial, ketidakpastian, serta kebutuhan masyarakat yang cepat berubah, perangkat daerah dituntut memiliki kesiapan menghadapi perubahan, kemampuan memberikan pelayanan secara responsif, serta motivasi untuk mencapai kualitas pelayanan yang optimal.

Kesiapan menghadapi perubahan dalam penanganan pascabencana berkaitan dengan kemampuan teknis, administratif, dan kapasitas individu atau organisasi dalam merespons situasi yang tidak pasti. Pemetaan terhadap kondisi awal berpengaruh pada kesiapan perangkat daerah sebagai dasar penyusunan intervensi pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Foto Bersama Peserta

Research Method

Program pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatoris. Pendekatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya kegiatan pengabdian yang dibagi dalam lima tahapan utama, yaitu studi lapangan, observasi, FGD, penyampaian materi, workshop, dan pendampingan praktik (*monitoring* dan *evaluasi*).

Sebagai dasar penyusunan materi, tim pengabdian masyarakat menyusun alat ukur berdasarkan sudut pandang psikologi agar materi dan evaluasi dapat dilakukan dengan tepat. Aspek yang dipetakan meliputi kesiapan terhadap perubahan, perilaku pelayanan, dukungan organisasi, komitmen terhadap tujuan, tanggung jawab, risiko pemilihan tugas, kreativitas dan inovasi, perhatian terhadap umpan balik, dan waktu penyelesaian tugas.

Setelah alat ukur dibuat, tim menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta ketika kegiatan berlangsung pada 4—6 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta. Materi juga diberikan dalam bentuk *training*, *counseling*, *coaching*, simulasi, dan *gaming*. Setelah materi diberikan dan diskusi dilakukan, tim pengabdian melakukan monitoring dan evaluasi secara daring untuk memantau perkembangan OPD.



Gambar 2. Pemberian Cenderamata

Discussion & Result

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi kondisi pascabencana. Kegiatan dilaksanakan pada 4—6 Agustus 2026 dengan melibatkan unsur OPD dan pemangku kepentingan untuk penguatan kapasitas kebencanaan.

Hasil kuesioner menunjukkan distribusi sebagai berikut:

Aspek	Rendah	Sedang	Tinggi
Kesiapan menghadapi perubahan	5%	40%	55%
Perilaku pelayanan	5%	20%	75%
Dukungan organisasi	15%	25%	60%
Komitmen terhadap tujuan	70%	0%	30%

Tabel 1. Hasil Kuesioner

Materi yang diberikan kepada peserta juga mengintegrasikan sudut pandang budaya dan bahasa untuk penyuluhan dan pemulihan pascabencana.

Dalam situasi kebencanaan, bahasa yang digunakan perlu mempertimbangkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan pemahaman masyarakat. Penyuluhan yang menggunakan istilah terlalu tinggi, rumit, atau teoretis akan menyulitkan masyarakat. OPD perlu memiliki kemampuan untuk memiliih bahasa yang sederhana, langsung, konkret, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini dapat membantu mengurangi kekeliruan masyarakat dalam memahami informasi kebencanaan.

Pengarahan tersebut juga menekankan penggunaan istilah oleh OPD harus diiringi dengan penjelasan. OPD juga diarahkan untuk menghindari kalimat yang terlalu abstrak, kalimat yang tidak logis, dan kalimat yang ambigu. Beberapa contoh kasus kebahasaan yang disampaikan adalah istilah “potensi bencana hidrometerologi” yang tidak dapat dipahami oleh semua kalangan. Istilah ini perlu disederhanakan, misalnya “Masyarakat perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum banjir datang, ke mana harus menyelamatkan diri, dan barang apa yang perlu dibawa.”. OPD diajak untuk memahami bahwa pengarahan yang lebih sederhana akan lebih dipahami oleh masyarakat. Penggunaan bahasa seperti ini membuat pesan lebih konkret, mengurangi kemungkinan salah tafsir, dan membantu masyarakat memahami tindakan yang perlu dilakukan.

Conclusion

Hasil kegiatan menunjukkan penanganan pascabencana di Kecamatan Tanjung Pura tidak berhenti pada persoalan respons kerusakan fisik dan fasilitas. Kondisi pascabencana juga berkaitan dengan kesiapan manusia, kualitas pelayanan publik, koordinasi organisasi, kondisi psikologis, serta kemampuan masyarakat menggunakan sumber daya sosial, budaya, dan bahasa.

Acknowledgement

Terima kasih kepada DPMK ITB atas dukungan pendanaan program ini melalui skema PMKI (Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia) sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan lancar.